



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMI DWI ASTUTI NURHAENI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 654289

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/100 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 262 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/110 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. Tanah Seluas 910 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 600.500.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 295.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.509.837.423**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.620.337.423



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.620.337.423

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.